

PERILAKU MEMILIH DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR: STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA MEDAN 2020

Ahmad Hasan Ubaid¹ dan H.B. Habibi Subandi²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

²Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail: hasanubaid82@ub.ac.id, habibisubandi@ub.ac.id

ABSTRAK. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku memilih masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Medan Tahun 2020. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data utama dari hasil survei perilaku memilih dan wawancara mendalam. Artikel ini menunjukkan bahwa perilaku memilih yang paling dominan pada masyarakat Medan ialah model sosiologis, yakni perilaku pemilih yang didasarkan pada preferensi sosiologis masyarakat. Faktor utamanya ialah disumbang oleh preferensi agama, etnis, maupun gender. Pemilih sosiologis tercatat dalam angka survey adalah sebesar 43,1%. Sedangkan pemilih rasional juga muncul, namun tidak sebesar pemilih sosiologis, yaitu pada persentase sebesar 36,8%. Demikian juga dengan pemilih psikologis yang jumlahnya hanya sekitar 10,8%. Kuatnya perilaku memilih sosiologis ini, kami menilai dipengaruhi salah satunya oleh narasi politik identitas yang sudah muncul dalam momen pemilihan sebelumnya, yakni Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, dan Pemilihan Presiden 2019. Narasi politik identitas ini ikut menyumbang terhadap menguatnya pertimbangan agama dalam perilaku pemilih di Kota Medan.

Kata Kunci: Politik Identitas; Perilaku Memilih; Model Sosiologis; Model Rasional; Model Psikologis

VOTING BEHAVIOR IN A MULTICULTURAL SOCIETY: A CASE STUDY FROM THE 2020 MEDAN CITY ELECTION

Abstract. This study attempts to explain the voting behavior in the case of the election of Mayor of the Medan in 2020. We use qualitative case study method in the research, with the data are mainly collected from opinion survey of the 2020 election and indepth interview. The study finds that sociological model of voter behavior dominated the voting behavior of voters in Medan, with its number estimated at around 43,1%. It is found that religion, ethnicity, and gender become the dominant factor that influence the voters' decision to cast their vote. Additionally, the presence of rational is estimated at around 36,8% and the psychological voters is calculated at around 10,8%. We consider this strong sociological model of voting behavior to be influenced by the narrative of identity politics that has emerged since the previous elections, namele the 2017th Jakarta Gubernatorial Election, the 2018th North Sumatra Gubernatorial Election, and the 2019th General Election. This identity political narrative has contributed to the strengthening of religious considerations in voters' behavior in Medan City

Keywords: Politics of Identity; Voter Behavior; Sociological Model; Rational Model; Psikological Model

PENDAHULUAN

Demokrasi dan penyelenggaraan pilkada langsung membawa dampak besar terhadap masyarakat multikultur Indonesia. Pada tahun-tahun awal paska reformasi, seiring dengan arus demokratisasi di Indonesia, studi dari Gerry Van Klinken mencatat bahwa konflik berbasis etnis dan agama di Indonesia telah merenggut korban hingga puluhan ribu jiwa, termasuk di dalamnya konflik berbasis separatisme di Aceh dan Timor Timor (Van Klinken, 2007). Dampak itu bisa dirasakan di banyak daerah dan salah satu yang cukup menonjol adalah di Kota Medan, Sumatera Utara.

Studi-studi literatur pada masa lampau tentang perilaku politik masyarakat Kota Medan menggarisbawahi karakteristik pluralisme yang berpengaruh pada perilaku berbasis identitas ethno-religijius (Fischer, 1975; Bruner E. M., 1963). Pada studi awal Bruner (1963) memberikan catatan unik

tentang perilaku masyarakat dari etnis Batak di wilayah urban seperti Medan, bahwasanya mereka menonjolkan marga (kekerabatan) seperti kebiasaan mereka di kampung asalnya. (Bruner E. M., 1963). Pada studi lanjutan Bruner (1974), dia menguraikan bahwa masyarakat Medan terdiri dari sembilan etnis dimana jumlah terbesar dari masing-masing kelompok etnis adalah Jawa (46,2%), Minangkabau (13,5%), Melayu (13,2%), Batak Mandailing (11,4%), Batak Toba (1,9%), Suku Batak lainnya (3,8%), Sunda (2,9%), Batavia (2,7%), dan suku lainnya (4,5%). Penduduk dari Jawa mendominasi dalam struktur masyarakat Medan karena mereka datang sebagai pekerja di perusahaan perkebunan sejak zaman Belanda, sementara suku Batak secara umum tidak mau bekerja di perkebunan karena pekerjaan itu tak pantas bagi mereka. Sikap mereka terhadap pendatang, dari Jawa khususnya, adalah sebagai segmen penduduk yang lebih rendah dengan menganggap para prianya sebagai kuli dan para

perempuannya sebagai *prostitute* (Bruner E. M., 1974).

Sementara itu dalam kaitannya dengan perilaku politik, ilmuwan politik William Liddle dalam studinya tentang politik etnisitas di Kota Pematangsiantar (1970), sebuah kota yang memiliki komposisi etnis mirip Kota Medan, memberikan catatan bahwa prinsip paling penting yang menjadi pembeda dari sikap politik masing-masing individu adalah afiliasi etnis dan agama. Persaingan dengan individu dari kelompok etnis lain didasari oleh sikap loyalitas pada etnisnya sendiri. Etnisitas mempengaruhi pilihan setiap individu terhadap tempat tinggal, sekolah, pekerjaan, agama, pertemanan, hingga organisasi politik. Hampir semua pemimpin politik memiliki basis dukungan dari kelompok etnis dan agama, seperti Parkindo dengan dukungan dari etnis Batak Toba yang beragama Kristen (Protestan), Masymi didukung etnis Batak Mandailing, dan PNI dengan dukungan dari etnis Jawa (Liddle, 1970).

Studi yang cukup baru tentang asal muasal munculnya identitas ethno-religius masyarakat kota Medan dipaparkan Johan Hasselgren (2000). Lewat analisis historis, Hasselgren berpendapat bahwa masyarakat Batak Toba mulai mengembangkan identitas yang kuat sejak interaksi suku itu dengan aktifitas misionaris *Rhenish Missionsgesellschaft* (RMG). Mereka telah merubah penduduk Batak Toba dari suku kecil dengan kebiasaan menyembunyikan identitasnya menjadi sebuah suku besar yang percaya diri dan mengambil alih posisi mayoritas dari etnis Melayu di Kota Medan sejak tahun 1950. Sejak itu, etnis Batak Toba terus mengembangkan diri dengan bekerjasama dengan suku lain di luar mereka untuk memperkuat pengaruh mereka di kota itu (Hasselgren, 2000).

Pada era Reformasi, studi tentang perilaku etnisitas dan religiusitas di Kota Medan dikembangkan dengan orientasi untuk membangun harmoni antar suku dan toleransi beragama. Ini terlihat salah satunya dari disertasi doktoral Godlig J Sianipar (2011) yang berfokus pada hubungan antara penduduk muslim dan Kristen di Medan dengan fokus pada nilai *Dalihan na Tohu* sebagai modal sosial untuk membangun harmoni hubungan antar kelompok. Dia berpendapat bahwa nilai-nilai kultural dan religi berkontribusi positif untuk mempromosikan pertemuan antar agama. Studinya juga menyimpulkan bahwa pengaruh nilai-nilai kultural, yaitu tiga aspek nilai dalam *Dalihan na Tohu*, memiliki kontribusi lebih besar daripada nilai-nilai agama dalam membangun hubungan persaudaraan antar agama (Sianipar, 2011).

Perkembangan terbaru muncul pada lima tahun terakhir sebelum gelaran pemilihan Walikota Medan 2020 dimulai. Pada dasarnya, menurut hemat penulis, fenomena baru ini dipengaruhi oleh menguatnya

isu identitas religius secara nasional yang dipicu oleh prahara politik di daerah konstituensi lain. Prahara politik itu adalah pilkada Jakarta tahun 2017 yang menyeret isu identitas agama dari kontestasi lokal menjadi isu nasional. Ini membawa dampak langsung ke wilayah konstituensi Sumatera Utara karena salah satu calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018. Alhasil, kontestasi poliik di Provinsi ini memiliki karakteristik yang sama dengan Pilkada DKI Jakarta.

Dalam kasus Pilgub Sumatera Utara 2018, pertarungan tersaji secara konfliktual dengan dua pilihan kandidat yang memiliki visi, misi, dan strategi yang kontras. Kandidat pertama ialah Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) yang mengeksploitasi identitas agama dengan menggunakan para pemuka Islam. Kampanye pasangan nomor urut 1 ini berorientasi pada ajakan untuk memikirkan identitas keagamaan dari mayoritas pemilih muslim dengan cara safari dakwah bersama ustad Abdus Shomad, dzikir akbar, penyediaan sarana dan prasarana masjid, serta solat subuh berjamaah. Sementara calon lainnya adalah Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS), menonjolkan kampanye berbasis kesukuan dengan narasi kemegahan adat. Mereka sering bergumul dalam berbagai ritus dan tradisi adat untuk meyakinkan pemilih. Pada tahun 2019, masyarakat Kota Medan kembali disuguhkan kontestasi serupa dalam panggung politik identitas nasional yang menghadirkan dua pasangan calon Presiden dengan latar belakang dan isu kampanye yang hampir sama.

Pada tahun 2020, masyarakat Medan kembali mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah untuk memilih walikota dan wakil walikota Medan. Permasalahan yang menarik diteliti dari pemilihan walikota dan wakil walikota Medan 2020 ini adalah bagaimana perilaku politik masyarakat Medan setelah menjalani tiga rangkaian pemilihan yang berbeda pada kurun waktu yang berurutan.

Rangkaian pemilihan yang terjadi sejak tahun 2017 menjadi salah satu faktor perubahan politik yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitan dengan dampaknya pada perilaku politik pemilih. Kajian terkait dengan fenomena perubahan politik dan pengaruhnya terhadap identitas etnis dan agama ini pernah dilakukan secara nasional oleh Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta (2003), dimana pada studinya mereka melakukan penggambaran secara deskriptif tentang perubahan demografis di berbagai wilayah secara nasional. Studi itu mencatat beberapa hal penting terkait perubahan demografi dalam kaitannya dengan etnisitas dan agama di Sumatera Utara, dimana Kota Medan menjadi ibukota Provinsi ini (Suryadinata,

Arifin, & Ananta, 2003). Namun studi itu tidak memberikan analisis mendalam tentang bagaimana perilaku politik dari berbagai elemen etnis dan agama di provinsi tersebut.

Pada studi lanjutannya tentang perubahan demografi di Indonesia, *Institute of Southeast Asian Studies* memperkenalkan klasifikasi baru terhadap lima belas etnis terbesar di Indonesia. Di studi ini mereka kembali meninjau ulang pengklasifikasian terhadap etnis Batak dan Melayu dari yang semula teragregasi dalam satu kelompok etnis menjadi terpecah pada sub-etnis. Khusus untuk etnis Melayu di Sumatera Utara, mereka memandang bahwa pengklasifikasian lama terhadap etnis Batak dan Melayu sangat problematis karena kedua etnis tersebut memiliki pengelompokan yang kompleks (Ananta, Arifin, Hasbullah, Handayani, & Pramono, 2015).

Studi ini hendak menguji kembali gagasan Saiful Mudjani berdasarkan kontestasi di Pilkada Jakarta 2017 bahwasanya sentiment identitas sosial di kalangan pemilih akan menguat jika dimobilisasi pada gelaran Pilkada dan akan mengalahkan kalkulasi rasional pemilih. Sementara apabila isu perbedaan identitas dinetralisir maka pemilih cenderung akan menonjolkan rasionalitas dalam memilih kandidat (Mujani S., 2020).

Di sisi lain, studi ini berupaya menjelaskan model perilaku memilih sosiologis dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kota Medan. Gagasan yang dihadirkan pada studi ini kurang lebih berseberangan dengan pandangan bahwa faktor sosiologis dalam perilaku memilih tidak cukup mampu menjelaskan perilaku memilih masyarakat Indonesia (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019). Paling tidak penjelasan tentang faktor sosiologis memilih ini dapat kita temui salah satunya wilayah konstituensi Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tracing Analysis*.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan dua cara. Pertama, peneliti menggunakan data hasil survey perilaku pemilih masyarakat dari lembaga konsultan politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang melakukan pengumpulan data dari responden pada bulan Juli 2020. Dalam survey tersebut kami terlibat di dalamnya sebagai peneliti rekanan, *associate researcher*.

Data primer kedua diperoleh dari hasil wawancara mendalam, *in-depth interview*. Kami

menggunakan kriteria penentuan informan sesuai tujuan penelitian, *purposive*. Menurut Jeffrey Johnson (1990) yaitu posisi atau kedudukan mereka di masyarakat dan keluasan aspek pandangan mereka terhadap obyek yang diteliti (Johnson, 1990). Berdasarkan kriteria itu, peneliti memilih tiga informan kunci dan pendukung yaitu Dimas Okky Nasution (Direktur ARSC), Rahmanita Ginting (Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), dan Sutardi (Ketua Tim Supervisi Survey ARSC).

Selain itu, data sekunder diperoleh dari data-data kepustakaan yang terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan secara khusus Kota Medan.

Studi ini menggunakan metode triangulasi sumber sebagai alat uji validasi data. Penyertaan tiga sumber data yang berbeda menjadi sarana memeriksa keabsahan masing-masing sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi Awal Berdasarkan Survei Poltracking Indonesia

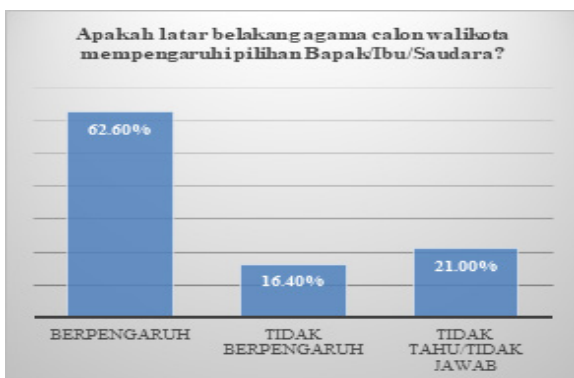
Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kota Medan menunjukkan bahwa jejak politik identitas berbasis agama dan etnisitas cukup tinggi di kota ini. Berdasarkan data survei Poltracking Indonesia pada bulan Januari 2020 menunjukkan hasil sebagaimana yang diilustrasikan oleh tiga diagram yang menunjukkan preferensi politik masyarakat (lihat Gambar 1, 2, dan 3).

Berdasarkan data awal ini dapat dinyatakan bahwa pemilih sosiologis di Kota Medan menguat dengan kisaran pemilih yaitu sebesar 34,8%. Sementara pemilih rasional berada di urutan kedua dengan jumlah 29,3%, dan diikuti dengan pemilih yang tidak tahu/tidak jawab sebesar 19,7% dan pemilih psikologis sejumlah 16,1 persen. Pemilih sosiologis, sebagaimana dijelaskan dalam data tersebut adalah pemilih yang menggunakan pilihannya dengan berdasarkan pada latar belakang agama, daerah, dan suku dari kandidat yang bersangkutan. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan visi-misi, kualitas dan kompetensi kandidat, serta pengalaman yang dimiliki kandidat. Berikutnya pemilih psikologis adalah pemilih yang memilih berdasarkan karakter personal, jenis kelamin, penampilan fisik, dan usia kandidat.

Sementara itu data lain yang menjadi temuan dari survey Poltracking Indonesia, menunjukkan agama dan etnisitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Diagram berikut ini menunjukkan preferensi politik masyarakat Kota Medan terkait dengan latar belakang agama calon Walikota Medan (Lihat gambar 2). Ketika

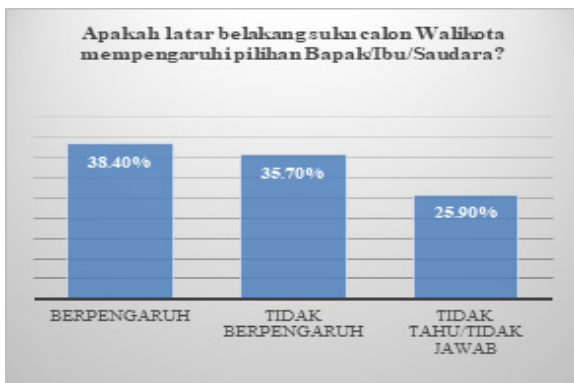
pemilih ditanya tentang ‘Apakah latar belakang agama calon Walikota mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara?’ Mayoritas pemilih menjawab ‘Berpengaruh’, yaitu 62,6%, sementara itu yang memberikan jawaban “Tidak Berpengaruh” adalah 36,4%, dan yang menjawab Tidak Tahu/Tidak Jawab ialah sebesar 21%.

Terkait dengan etnisitas, survey Poltracking Indonesia juga menemukan data yang menarik. Dari 100% responden yang diberikan pertanyaan: Apakah latar belakang suku calon Walikota mempengaruhi pilihan Bapak/Ibu/Saudara? Respon masyarakat adalah bahwa sebesar 38,4% menjawab Berpengaruh, 35,7% menjawab Tidak Berpengaruh, dan 25,9% menjawab Tidak Tahu/Tidak Jawab (lihat Gambar 2).



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Gambar 1. Pengaruh Agama Terhadap Pemilih



Sumber: Survei Poltracking Indonesia, 2020

Gambar 2. Pengaruh Latar Belakang Suku

Pada data lain tentang pengelompokan preferensi pemilih, hasil survei Poltracking Indonesia mengkategorikan preferensi pemilih terhadap calon walikota dan wakil walikota secara sosiologis, rasional, dan psikologis. Indikator turunan dari kategori pemilih sosiologis terdiri atas agama yang dianut oleh kandidat, asal daerah kandidat, dan suku bangsa/etnis kandidat. Pada pemilih rasional, indikatornya terdiri dari pandangan kandidat terhadap visi-misi dan program calon walikota, kualitas/kompetensi kandidat, dan kinerja atau pengalaman kandidat. Sementara itu pemilih psikologis dilihat dari bagaimana pandangan pemilih terhadap

karakter personal kandidat, gender atau jenis kelamin kandidat, penampilan fisik, dan usia kandidat calon walikota – wakil walikota. Secara berturut-turut berdasar hasil survei Poltracking Indonesia pada bulan Januari 2020 adalah pemilih sosiologis tercatat sebesar 34,8%, pemilih rasional 29,3%, dan pemilih psikologis sebesar 16,1%. Sementara pemilih yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebesar 19,7% (Poltracking Indonesia, 2020)

Pluralitas Masyarakat Kota Medan

Pada tahun 2019 penduduk Kota Medan berjumlah 2.279.894 jiwa, terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 15.749 jiwa (0,7%) dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan luas wilayah 265,10 km² kepadatan penduduk 8.600 jiwa/km² yang terbagi atas 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan (BPS Kota Medan, 2020).

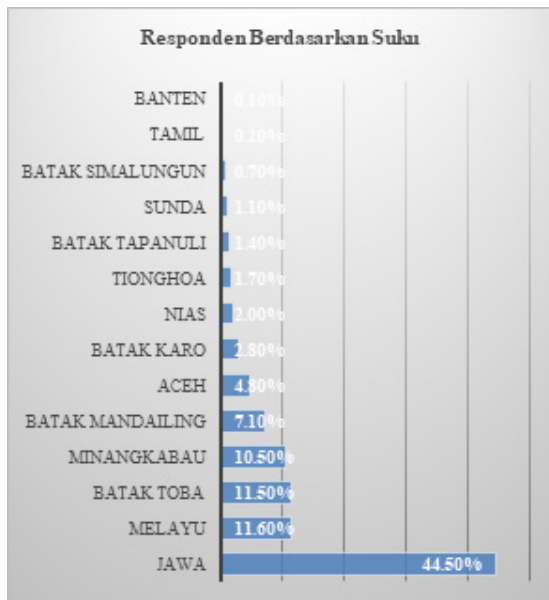
Penduduk Kota Medan memiliki beberapa ciri penting yang meliputi agama, etnis, dan keberagaman adat istiadat. Penghuni awal Kota Medan adalah orang asli Melayu dan Karo. Untuk mayoritas etnis masyarakat Medan didominasi oleh Suku Jawa, Suku Batak dan Suku Melayu. Di Kota Medan juga banyak keturunan India dan Tionghoa dan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah keturunan Tionghoa yang cukup banyak.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dengan penduduk lebih dari 2 juta. Kondisi tersebut menjadikan Kota Medan salah satu rujukan banyak penelitian yang berfokus pada isu etnisitas dan religiusitas. Hal itu tercermin dari banyaknya suku yang tinggal dan menetap di sana. Sebut saja mulai dari suku Jawa, Melayu, Batak, Tionghoa hingga Tamil. Pun begitu juga dengan bahasa yang digunakan juga sangat bermacam-macam.

Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruku di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Heterogenitas budaya di Kota Medan terkodefikasi dalam ruang sosial solid dan utuh, sehingga gesekan di antara budaya relatif rendah.

Ragam etnis, suku, atau identitas kedaerahan yang terekam dalam survei ARSC pada bulan Juli tahun 2020 diantaranya adalah Suku Jawa (44,5%), Suku Melayu (11,6%), Suku Batak Toba (11,5%), Suku Minang (10,5%), Suku Batak Mandailing (7,1%), Suku Aceh (4,8%), Suku Batak Karo (2,8%), Suku Nias (2%), Etnis Tionghoa (1,7%), Suku Batak Tapanuli (1,4%), Suku Sunda (1,1%), Suku Batak Simalungun, etnis Tamil (0,2%), dan Banten (0,1%) (Akar Rumput Strategic Consulting, 2020).

Satu hal yang cukup menarik perhatian dari data terbaru ini terletak pada perbandingannya dengan data sensus penduduk yang disajikan oleh Bruner pada penelitiannya tahun 1974. Data terbaru menunjukkan kenaikan signifikan persentase penduduk suku Batak Toba dari 1,9% di tahun 1974 menjadi 11,50% pada tahun 2020 (Bruner E. M., 1974).



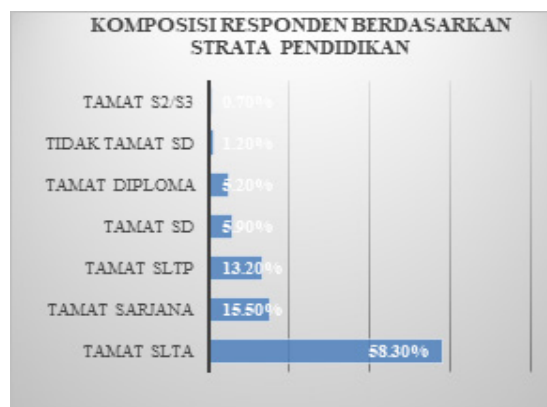
Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 3. Ragam Etnis di Kota Medan

Gambaran data penduduk yang majemuk itu mengafirmasi banyak data survei yang menyebutkan bahwa Kota Medan memiliki tipe perilaku memilih model *colombian*. Model ini meniscayakan perilaku memilih yang terkooptasi pada satuan ajaran agama, budaya dan adat yang sama. Studi ini kemudian lebih dikenal dengan model sosiologis. Model sosiologis memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri individu yang memengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain. Tipologi ini tentu akan berbeda dengan kebanyakan wilayah perkotaan yang rata-rata memiliki kecenderungan perilaku memilih yang model rasional.

Terdapat dua hipotesa kenapa pemilih perkotaan memiliki kecenderungan sebagai pemilih yang rasional. *Pertama*, tingkat pendidikan masyarakat perkotaan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah *rural*. Tentu hal tersebut terkondisikan karena aspek kesadaran masyarakatnya yang tinggi terhadap pendidikan. Sehingga masyarakat perkotaan dalam aspek ini memiliki keterbukaan pikiran terhadap banyak hal termasuk politik.

Gambar 4 di atas merupakan hasil survei ARSC terkait kondisi Strata Pendidikan masyarakat di Kota Medan. Terlihat bahwa mayoritas masyarakat Kota Medan berpendidikan SLTA atau sederajat sebesar 58,3% dan juga Sarjana S1 sebesar 15,5%.



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 4. Strata Pendidikan Masyarakat Kota Medan

Masyarakat perkotaan akan melihat, menilai baru kemudian membuat keputusan untuk memilih dalam politik berdasarkan pada aspek yang menurutnya logis dan rasional. Jarang kemudian mereka mensandarkan pilihan politiknya kepada model sosiologis yang terikat pada keputusan agama, suku dan ormas. Dengan begitu hipotesa yang *kedua* terkait dengan preferensi memilih masyarakat perkotaan yang mayoritas menilai bahwa pilihan politik mereka ditentukan oleh faktor dirinya sendiri. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga membuat masyarakat perkotaan memiliki pola pikir yang terbuka dan mampu menilai secara mandiri aspek-aspek tertentu yang dianggap paling rasional dalam pertimbangan berpolitik, menjadikan mereka banyak mensandarkan pilihan politiknya pada diri mereka sendiri sebagai penentunya. Artinya, masyarakat perkotaan memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai dan menentukan sikap politik berdasarkan preposisi-preposisi yang terbentuk dari pengalaman membaca dan menganalisa suatu kejadian. Kondisi perkotaan yang ‘melek internet’ tentu turut menyumbang kemudahan masyarakat perkotaan dalam melakukan berbagai aspek tersebut di atas. Namun demikian hasil penelitian kami tidak sepenuhnya menggambarkan linieritas bahwa masyarakat kota secara otomatis dalam perilaku memilihnya mayoritas rasional. Justru sebaliknya perilaku memilih di Kota Medan mayoritas sosiologis.

Identifikasi Dukungan Terhadap Partai Politik

Identifikasi dukungan partai politik didefinisikan sebagai rasa keterikatan pribadi dan afektif pada partai politik yang didasarkan pada perasaan kedekatan dengan kelompok sosial yang terkait dengan partai. Di sini yang dinilai sejauh mana pemilih mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari partai tertentu, atau ia merasa dekat secara psikologis dengan sebuah partai tertentu.

Dalam konteks pemilihan lokal, identifikasi dukungan terhadap partai memang tidak menjadi arus utama dalam menilai perilaku pemilih, sebab

sejauh ini yang muncul perilaku pemilih cenderung didasarkan pada faktor sosiologis, misalnya religiusitas, etnisitas, maupun karena faktor latar belakang kandidat. Namun demikian, identifikasi dukungan partai politik ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan partai politik kaitannya dengan dukungan pemilih, terutama apakah pemilih menentukan kandidat didasarkan pada dukungan partai.

Dalam konteks Kota Medan, apabila melihat pada perkembangan 10 tahun terakhir perolehan suara partai mengalami pasang-surut, meski ada sebagian partai yang memperoleh kursi stabil. Misalnya, PDI-P sejak pemilu legislatif 2014 dan 2019 konsisten mendapatkan kursi tinggi yakni 9 kursi dan 10 kursi. Demikian dengan Partai Gerindra yang pada pemilu legislatif 2019 hanya mendapatkan 6 kursi, kemudian naik menjadi 10 kursi pada tahun 2019.

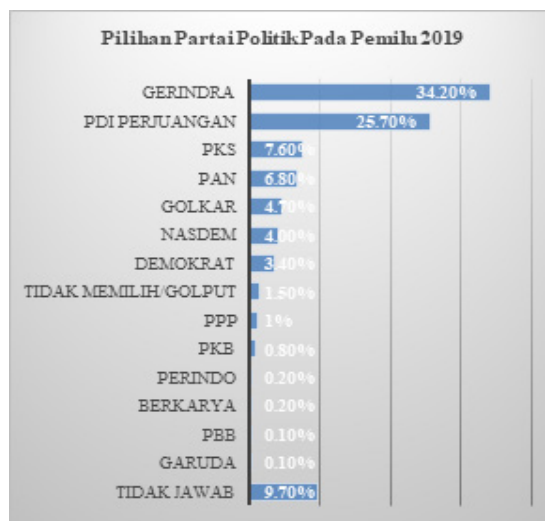
Sedangkan untuk partai berbasis Islam, hanya PKS dan PAN yang mengalami kenaikan. PKS dari 5 kursi pada 2014 kemudian naik menjadi 7 kursi pada 2019, demikian pula dengan PAN yang mendapat 4 kursi pada 2014 naik menjadi 6 kursi pada 2019. Berbeda dengan PPP yang mengalami penurunan kursi, pada 2014 mendapat 5 kursi dan 2019 hanya 1 kursi. Sedangkan untuk partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 2 kursi pada pemilu legislatif 2019 (Nugroho, 2020).

Jika melihat dukungan partai politik di Kota Medan dengan mendasarkan pada perolehan kursi, maka terlihat dua partai yakni PDI-P dan Partai Gerindra yang memperoleh suara tinggi selama 10 terakhir. Sedangkan partai Golkar dan Demokrat mengalami penurunan, meski tidak cukup besar. Uniknya, partai berbasis Islam seperti PKB yang unggul di Jawa, justru tidak mendapat kursi sama sekali. Partai Islam yang mendapat dukungan signifikan ialah PKS dan PAN.

Gambaran perolehan kursi DPRD di Kota Medan ini memiliki kesamaan dengan hasil survei ARSC pada bulan Juni 2020, dimana tiga partai besar yang mengaku dipilih oleh masyarakat Kota Medan pada pemilu legislatif 2019 secara berurutan adalah Partai Gerindra, PDI-P, dan PKS. Sementara posisi ke 4, 5, 6 dan 7 diisi oleh PAN, Golkar, Nasdem, dan Demokrat.

Pada gambar 5 di atas terlihat dukungan mayoritas masyarakat di Kota Medan terkonfirmasi pada dua partai besar, yakni PDI-P dan Partai Gerindra. Dua partai ini memiliki kesamaan secara ideologis, yakni berhaluan nasionalis. Namun dengan momentum pilpres 2014 dan Pilpres 2019 kedua partai ini bergerak ke kubu berlawanan. Partai Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto membangun aliansi dengan kelompok Islam konservatif kanan,

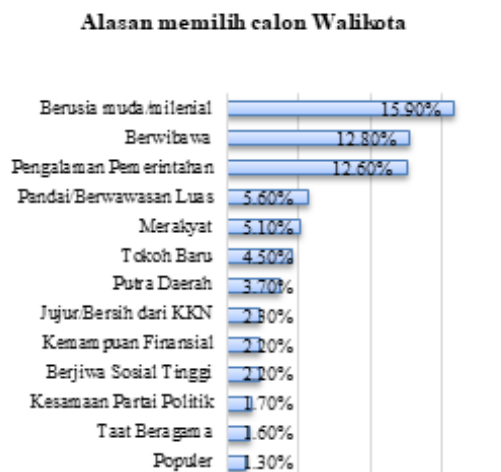
seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNP) Ulama dan Persatuan Alumni (PA) 212. Sedangkan PDI-P dengan berada pada sisi sebaliknya dengan mengkampanyekan persatuan nasional. Sehingga tak heran jika kita perhatikan lebih teliti sebenarnya dari 10 anggota DPRD Kota Medan dari PDI-P semuanya memiliki latar belakang non muslim, sementara 10 anggota DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra 7 diantaranya beragama Islam dan 3 beragama Kristen. Itu berarti bahwa Partai Gerindra memperoleh dukungan dari pemilih muslim lebih besar dari PDI-P. Sebagian penjelasan terhadap keberhasilan partai nasionalis seperti PDI-P dan Partai Gerindra ini adalah karena adanya peningkatan jumlah pemilih rasional (Trihartono & Patriadi, 2016).



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 5. Pilihan Politik Masyarakat berdasarkan Partai Politik

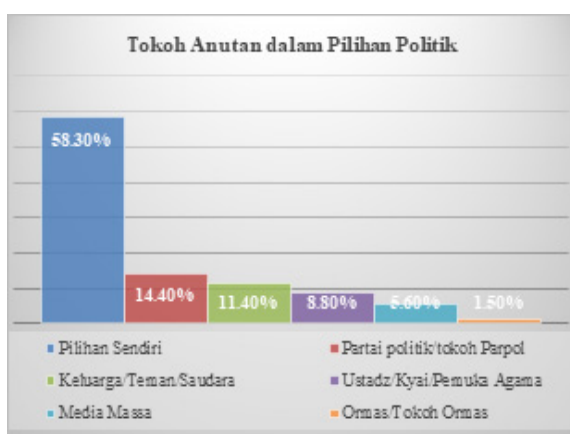
Sementara itu perilaku memilih di Pilwali Kota Medan 2020 yang didasarkan pada preferensi partai politik cukup rendah, sebab masyarakat cenderung mempertimbangkan sosok personal kandidat atau figur calon. Ini tergambar pada hasil survei ARSC berikut ini:



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 6. Alasan Memilih Calon Wali Kota

Pada gambar 6 menunjukkan bahwa alasan dalam memilih calon wali kota yang paling besar ialah karena figur, misalnya ia muda atau kalangan milenial, berwibawa, berpengalaman, dan alasan personalitas lainnya. Sedangkan alasan kesamaan partai politik sangat kecil, hanya sekitar 1,7 persen. Namun pada pertanyaan yang lain (lihat gambar 8) berkaitan dengan tokoh anutan dalam pilihan politik, sebagian pemilih di Kota Medan masih menggantungkan pada tokoh partai politik, meski mayoritas pemilih masih otonom dengan mendasarkan pada pilihan sendiri. Hasil yang sama juga terjadi pada survei Poltracking di Pilwali Kota Medan pada Januari 2020 yang menyebutkan bahwa latar belakang kandidat secara personal sebesar 54,2%, sedangkan hanya sebagian yang karena melihat partai pengusung kandidat yakni sekitar 15,0% (Poltracking, 2020).



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 7. Tokoh Anutan dalam Pilihan Politik

Perilaku memilih di Kota Medan berkaitan dengan identifikasi partai ini setidaknya mengkonfirmasi studi yang selama ini berkembang bahwa identifikasi kedekatan dengan partai politik (*party-ID*) belum sepenuhnya menjadi preferensi utama dalam menentukan pilihan politik, terutama berkaitan dengan kualitas dan kinerja partai politik yang buruk. Misalnya studi Burhanuddin Muhtadi mengkonfirmasi bahwa tren *party-ID* atau kedekatan dengan partai di Indonesia semakin menurun karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Implikasinya masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap partai (Muhtadi B., 2013).

Faktor Penentu Dalam Perilaku Memilih Masyarakat Medan

Preferensi politik merupakan tindakan yang mendasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Dalam studi politik, terutama berkaitan dengan perilaku memilih, mengetahui tentang preferensi masyarakat akan memberikan gambaran apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Studi Goldman

menyebutkan bahwa dari preferensi pemilih ini memberikan tiga hal penting kaitannya dengan perilaku memilih. Pertama, sejauh mana pemungutan suara pada satu masalah terkait dengan pemungutan suara pada masalah lain; Kedua, potensi afiliasi partai kaitannya dengan prediksi pemungutan suara. Di sini afiliasi partai dilihat sebagai kerangka acuan dalam melihat preferensi pemilih; Ketiga, hubungan karakteristik demografis dengan perilaku memilih (Goldman, 1966).

Faktor personal yang dialami pemilih juga berdampak terhadap perilaku memilih. Misalnya kelompok rentan yang mengalami diskriminasi cenderung pilihan politiknya akan mendukung kelompok atau partai politik yang mengusung ide-ide kesetaraan atau anti diskriminasi. Begitupula dengan lokasi pemungutan suara berpengaruh terhadap perilaku memilih. Misalnya, memberikan hak suara di gereja membuat orang lebih cenderung memilih atau mendukung kandidat konservatif dan menentang pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan pemungutan di tempat-tempat umum seperti sekolah (Goldman, 1966). Singkatnya, emosi dan juga latarbelakang pemilih memberikan faktor pendukung bagaimana pemilih memutuskan pilihan politiknya.

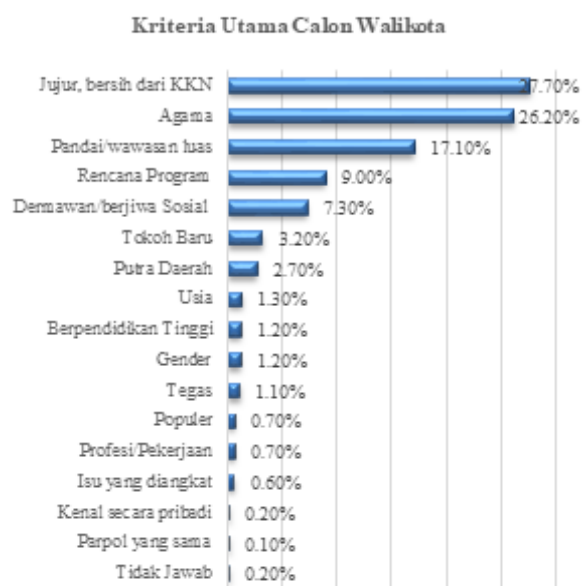
Dalam konteks perilaku memilih di Kota Medan, setidaknya terdapat empat kategori yang bisa dipetakan. Pertama, faktor keagamaan. Kedua, faktor primordial seperti kesukuan atau kedaerahan. Ketiga, faktor jenis kelamin atau gender. Keempat, faktor latar belakang pengalaman kandidat. Keempat faktor yang menjadi preferensi pemilih ini kemudian saling melengkapi dan membentuk habitus pada perilaku memilih.

Faktor Agama

Dalam penelitian perilaku pemilih di Indonesia kaitannya dengan pemilu nasional, maupun lokal, agama masih dianggap sebagai faktor penting dalam pembentukan pilihan politik warga negara (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019). Hal ini tidak lepas dari agama yang memberikan orientasi nilai kepada pemeluknya, termasuk dalam hal urusan politik. Sehingga keterkaitan antara agama dan politik selalu menjadi diskursus dalam kajian politik Indonesia.

Pertimbangan agama sebagai kriteria calon Wali Kota Medan juga muncul dalam hasil survei ARSC (lihat Gambar 8), dimana masyarakat menyatakan agama merupakan kriteria utama dalam memilih seorang wali kota. Sedangkan wacana tentang pemimpin bersih dan bebas dari KKN yang mayoritas dijadikan kriteria memang menjadi wacana umum yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Medan, sebab tiga dari wali kota yang pernah menjabat tersandung kasus korupsi (CNN Indonesia,

2020). Pertama, Abdillah yang menjabat wali kota periode 2005-2010 tersandung kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2005 serta kasus penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan 2002-2006. Kedua Rahudman Harahap Wali Kota Medan periode 2010-2015 terjerat kasus korupsi berkaitan dengan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp 1,5 miliar untuk kepentingan pribadi. Ketiga, Dzulmi Eldin yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima sejumlah uang suap dari kepala dinas Pemerintah Kota Medan. Sehingga tidak heran pertimbangan kandidat yang bersih dari KKN menjadi isu utama yang diharapkan oleh masyarakat.



Sumber: Survei ARSC, Juni 2020

Gambar 8. Kriteria Utama Calon Wali Kota

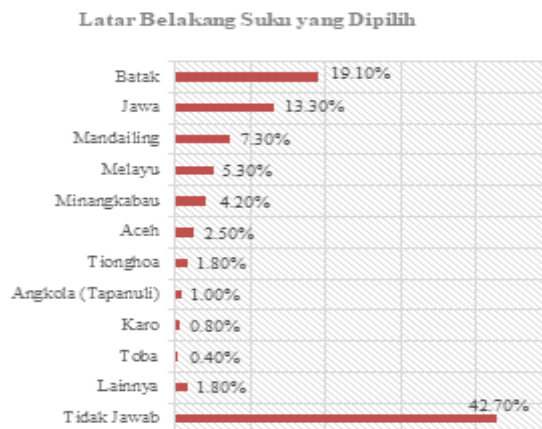
Gambaran survei di atas terlihat bahwa alasan sosiologis dan rasional masih mendominasi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Kota Medan melekat dalam diri seorang kandidat. Seorang politisi yang memiliki *track record* bersih dari kasus hukum, jujur dan tidak pernah terlibat kasus KKN masih menjadi kriteria utama seorang kandidat agar dapat dipilih oleh masyarakat. Sedangkan alasan agama menjadi kriteria selanjutnya yang harus dihadirkan. Data tersebut menunjukkan bahwa 26,2% masyarakat Kota Medan menjadikan faktor agama sebagai landasan dalam menentukan pilihan politik di Pilwali Kota Medan. Tidak heran jika kemudian isu-isu keagamaan relatif santer terdengar dalam portofolio kontestasi di Pilwali Kota Medan. Isu Komunisme yang dilekatkan dalam rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi salah satu itu yang menjembatani alasan sosiologis yang melekat pada perilaku memilih masyarakat Kota Medan. Isu yang menyerang salah satu partai

tersebut saat ini belum memiliki relevansi pengaruh di masyarakat, terutama di masyarakat Kota Medan (Sutardi, 2020; Ginting, 2020).

Faktor Etnisitas/Kedaerahan

Faktor pendukung berikutnya juga berkaitan dengan identitas etnis atau kedaerahan. Pada masyarakat Kota Medan yang multikultur, tampak bahwa pertimbangan suku menjadi salah satu yang menentukan dalam perilaku memilih.

Data sebelumnya pada gambar 3 (lihat hasil survei Poltracking di bagian latar belakang) menunjukkan bahwa sebesar 38,4 persen masyarakat Kota Medan menyebutkan bahwa latar belakang suku calon berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Sedangkan sebesar 35,7 persen menyebutkan tidak berpengaruh. Data ini menunjukkan bahwa satu sisi masyarakat Medan dengan perkembangan kota yang maju dan menerima adaptasi perubahan dan modernitas kota menempatkan kesukuan sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan kepemimpinan kota. Berkembangnya modernitas ini sedikit banyak berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat menilai kepemimpinan politik. Di sisi yang lain, kuatnya komunitas etnis atau suku yang ada di Kota Medan juga memberikan internalisasi nilai bagi masyarakat. Itu sebabnya sebagian masyarakat menilai latar belakang suku calon wali kota berpengaruh terhadap pilihan politiknya.



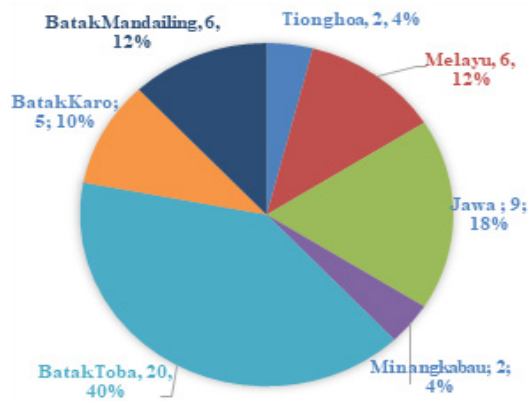
Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 9. Latar Belakang Suku yang Dipilih

Kemudian ketika diperdalam lebih jauh lagi dengan pertanyaan suku apa yang akan dipilih, berdasarkan hasil survey ARSC bulan Juli 2020, pada gambar 9 menunjukkan sebesar 19,1 persen memilih suku Batak, 13,3 persen memilih suku Jawa, dan 7,3 persen memilih suku Mandailing, serta 5,3 persen memilih suku Melayu. Data preferensi suku ini muncul tidak lepas dari identitas yang ditonjolkan mengikuti suku apa yang menjadi identitas para pemilih. Misalnya, orang Jawa secara psikologis akan cenderung memilih orang Jawa sebagai pemimpinnya. Demikian dengan orang Batak

akan memilih orang Batak juga sebagai pemimpin. Meskipun dalam kasus pemilihan, pengaruh etnisitas ini hanya terbatas dan cenderung tidak konsisten (Sutardi, 2020).

Keragaman masyarakat kota Medan itu juga tampak dalam komposisi Anggota DPRD Kota Medan terpilih berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2019. Dari total sejumlah 50 (lima puluh) Anggota DPRD Kota Medan jika kita kategorikan berdasarkan suku maka ditemukan fakta menarik yaitu terdapat 20 orang yang berasal dari suku Batak Toba, 9 orang suku Jawa, 6 orang suku Melayu, 6 orang suku Batak Mandailing, 5 orang suku Batak Karo, 2 orang suku Minangkabau, dan 2 orang dari etnis Tionghoa (lihat gambar 10). Sementara keragaman berdasarkan agama yang dianut oleh anggota DPRD Kota Medan adalah 31 orang beragama Islam, 17 orang beragama Kristen, 1 orang beragama Konghucu, dan 1 orang beragama Buddha. Data ini mengkonfirmasi bahwa keragaman etnis pada level masyarakat atau pemilih memiliki keterkaitan secara korespondensi dengan perilaku memilih masyarakat Kota Medan.



Sumber: Wawancara Dimas Okky Nugroho (Nugroho, 2020)

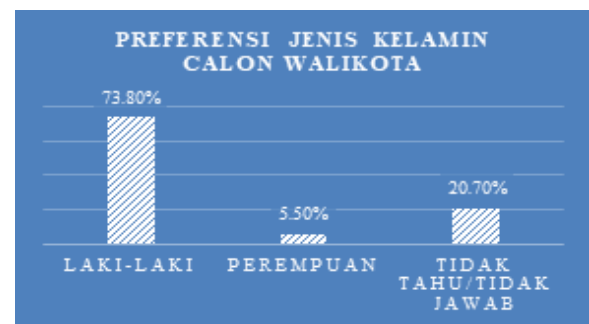
Gambar 10. Komposisi Anggota DPRD Kota Medan Berdasarkan Suku/Etnis

Faktor jenis kelamin

Selain faktor agama, dan etnis, faktor lain yang menggambarkan perilaku memilih masyarakat Kota Medan ialah berkaitan dengan jenis kelamin. Pada aspek jenis kelamin, berdasarkan survei ARSC pada Pilwali Kota Medan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di Kota Medan sebesar 52,8 persen menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap pilihannya dan hanya 26,8 persen yang menyebutkan tidak berpengaruh. Sedangkan jenis kelamin apa yang disukai, pada gambar 12 terlihat mayoritas pemilih di Kota Medan menyukai laki-laki sebesar 73,8 persen. Sedangkan hanya bagian kecil, yakni 5,5 persen yang menyukai perempuan.

Besarnya dukungan pemilih terhadap jenis kelamin laki-laki ini setidaknya menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, sistem keterbukaan politik dan syarat keterwakilan perempuan belum sepenuhnya membawa implikasi terhadap menipisnya

patriarki di kalangan masyarakat, termasuk di tingkat politik lokal. Pemerintah Indonesia melalui regulasi pemilu dan partai politik mensyaratkan setidaknya keterwakilan 30 persen di dalam kepengurusan partai politik maupun calon legislatif. Namun demikian regulasi ini belum sepenuhnya membawa perubahan besar, meski pada tataran regulasi sudah cukup menjembatani agar ada keterwakilan perempuan. Kedua, sistem sosial di masyarakat, baik itu berkaitan dengan budaya maupun agama masih cenderung patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih superior dibandingkan perempuan (Nurchayho, 2016). Dari sini terlihat bahwa corak perilaku memilih Kota Medan masih menggambarkan karakter psikologis, dimana atribut berkaitan dengan identitas gender masih menjadi salah satu acuan dalam menentukan pilihan politiknya.

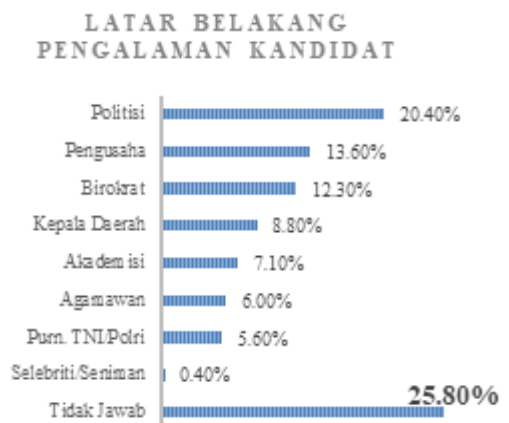


Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 11. Jenis Kelamin Yang Akan Dipilih

Faktor latar belakang pengalaman kandidat

Adapun pada faktor latar belakang pengalaman kandidat, sebagaimana dalam gambar 12 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan lebih menyukai dari kalangan politisi yakni sebesar 20,40 persen, berikutnya pengusaha 13,60 persen dan birokrat 12,30 persen. Sementara itu profesi lainnya yang digadang untuk menjadi pengalaman dari kandidat calon adalah mantan Kepala Daerah (8,80%), Akademisi (7,10%), Agamawan (6%), dan Purnawirawan TNI/POLRI (5,60%), dan Selebriti (0,40%).



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 12. Latar Belakang Pengalaman Kandidat

Dari faktor latar belakang pengalaman kandidat ini, terlihat bahwa perilaku memilih di Kota Medan cenderung menyukai politisi, namun demikian mereka juga menginginkan kombinasi agamawan dalam pemerintahan Kota Medan (lihat gambar 13). Tren tokoh agama atau agamawan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Medan ini sebenarnya muncul tidak lain salah satunya dipengaruhi oleh arus besar wacana populisme agama yang muncul dalam panggung politik nasional, misalnya pada kasus Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilgub Sumut 2018, dan Pilpres 2019. Pada periode kedua Jokowi, dia menggandeng Ma'ruf Amin yang merupakan ulama dan tokoh penting di NU. Tujuannya salah satunya untuk membuktikan bahwa Jokowi tidak anti terhadap kelompok Islam seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Secara garis besar, Jokowi merespon kuatnya wacana politik agama dengan menghadirkan tokoh agama ke dalam proses politik pilpres, sebagaimana yang juga dilakukan Prabowo dengan aliansi PKS dan beberapa kelompok Islam lainnya. Kami menilai, tiga momentum pemilihan tersebut yang memunculkan populisme agama ke dalam panggung politik sedikit banyak berpengaruh dalam tren politik yang ada di daerah, termasuk di Kota Medan. Muncul kemudian sentimen identitas agama yang menguat. Artinya di sini perilaku pemilih yang menginginkan tokoh agama masuk menjadi bagian dari kandidat sedikit banyak dipengaruhi oleh arus politik yang sedang berlangsung sebelumnya.

Komposisi Pemilih Sosiologis, Rasional, Dan Psikologis

Perilaku memilih masyarakat Kota Medan kaitannya dengan pemilihan wali kota memang tampak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang cenderung karena faktor rasional, sosiologis, maupun psikologis. Namun secara umum kami menemukan bahwa faktor sosiologis yang cukup dominan dalam perilaku memilih masyarakat.

Faktor sosiologis, merujuk pada aspek-aspek yang menurut Mujani, Liddle dan Ambardi penggerak utamanya ialah perbedaan dalam hal jenis kelamin, usia, etnis, daerah tempat tinggal, agama, dan kelas sosial. Sedangkan faktor pilihan rasional merujuk kepada pertimbangan untung dan rugi dalam memilih, dimana pemilih merasa keterlibatannya dalam suatu pemilihan untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui tokoh anutan, representatif, dan pemimpin mereka (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019). Adapun faktor psikologis cenderung menempatkan pertimbangan keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat (Haryanto, 2014). Ikatan

psikologis ini diperoleh dari faktor sosialisasi politik dalam internal keluarga, teman sepermainan, dan para kerabat-kerabat dekat.



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 13. Komposisi Perilaku Memilih Kota Medan

Pada gambar 13 ditemukan perilaku memilih masyarakat Kota Medan dalam Pilkada mayoritas kecenderungannya sosiologis yakni sebesar 43,10 persen. Faktor sosiologis yang besar ini setidaknya berasal dari dua kontribusi, yakni agama dan etnisitas.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konstruksi agama masih menjadi bagian dari preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya di Kota Medan. Hal ini tampak dari berbagai anasir dan wacana yang mengemuka di kalangan para pemilih. Misalnya, tentang pemimpin yang berlatar belakang Islam, atau dukungan pemuka agama yang dianggap mempengaruhi dalam dukungan politik. Agama, sebagai sumber ajaran yang memuat nilai-nilai bagi pemeluknya, sedikit banyak akan memberikan inspirasi bagi pemeluknya dalam pemberian dukungan politik, meski dalam banyak catatan pengaruh ini terbatas dan tidak konsisten dalam perilaku memilih. Misalnya kaitan dengan dukungan partai politik pasca reformasi, justru mayoritas pemilih di Indonesia masih mendukung partai-partai sekuler maupun partai nasionalis, seperti Golkar, PDI-P maupun Gerindra.

Namun demikian, penggunaan isu agama yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di beberapa daerah menunjukkan bahwa isu agama masih relevan dan terus berkembang. Penelitian Ramadhan dan Masykuri menunjukkan sepanjang pemilukada 2015-2018 terdapat isu agama yang muncul, mulai dari isu larangan memilih pemimpin non-Muslim seperti di Pilgub Sulawesi Utara 2015, Pilwali Kota Solo 2015, dan Pilgub DKI Jakarta 2017, hingga kasus himbauan agar memilih pasangan Muslim-Muslim seperti Pilkada Sumatera Utara 2018. Mereka menyimpulkan bahwa penggunaan isu agama ini tidak lepas dari dua hal, yakni konteks sosio-politik di daerah dan berikutnya konteks kompetitor.

Konteks sosio-politik merujuk pada historitas daerah tersebut dalam kaitannya dengan konflik agama di masa lalu. Sedangkan konteks kompetitor berkaitan dengan formasi kandidat yang terdapat dari kalangan kelompok agama minoritas tertentu, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang berasal dari Kristen-Tionghoa dan Sihar Sitorus di Pilgub Sumut 2018 yang berasal dari Kristen (Ramadhan & Masykuri, 2018).

Menguatnya konstruksi agama yang masih menjadi bagian preferensi pemilih di Kota Medan ini kami menilai tidak lepas dari arus penggunaan isu agama yang muncul dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, terutama pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilgub Sumut 2018 dan Pilpres 2019. Apalagi isu agama yang muncul di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat elektabilitas Ahok. Dalam exit poll Indikator, pemilih Jakarta yang puas terhadap kinerja Ahok tapi tidak memilihnya yakni 54,50 persen lantaran faktor agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih (Muhtadi B., 2018).

Adanya pengaruh penggunaan identitas agama yang berlangsung pada pemilihan sebelumnya juga diungkapkan serupa oleh Dimas Oky Nugroho (Direktur Akar Rumput Strategic Consulting):

“Menguatnya pertimbangan agama pada perilaku memilih masyarakat Kota Medan memang ada konteks turunan politik dari Pilgub DKI 2017, Pilgub Sumut 2018, dan Pilpres 2019. Hal itu tercermin dari isu-isu agama yang muncul di masyarakat,” (Nugroho, 2020)

Kedua, selain faktor agama, besarnya kecenderungan perilaku memilih sosiologis di Kota Medan ini juga disumbang oleh aspek etnisitas atau kesukuan. Dalam survei Poltracking Indonesia dan juga ASRC, faktor etnisitas muncul dalam preferensi pemilih, meskipun tidak sebesar faktor agama. Faktor etnisitas tetap berkembang dan menjadi salah satu preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam studi Muhtadi, etnisitas bisa muncul sangat bergantung pada bagaimana dinamika politik lokal yang berkembang. Dia mencontohkan, dalam kasus Pilgub Sulawesi Utara 2015, justru efek etnisitas tidak begitu besar di banding faktor agama dan personal kandi. Salah satu alasannya karena seluruh calon gubernur Sulawesi Utara waktu itu berasal dari etnik Minahasa semua. Oleh karena itu, signifikansi etnis rendah. Tapi berbeda dengan kasus yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 202, di mana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang sama-sama berasal dari Betawi. Sedangkan lawannya adalah Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Jawa dan berpasangan dengan politisi yang berlatar

belakang Kristen Tionghoa, Ahok. Perilaku memilih dalam pilgub DKI Jakarta 2012 tampak bahwa pengaruh etnis cukup signifikan. Misalnya, pemilih dari etnis Jawa dan Tionghoa cenderung memilih Jokowi-Ahok dibanding Fauzi-Nachrowi. Sebaliknya, pemilih Betawi cenderung memilih Fauzi-Nachrowi dibanding Jokowi-Ahok (Muhtadi B., 2018).

Dalam konteks Sumatera Utara, etnisitas menjadi bagian dari politik lokal sudah berkembang sejak isu desentralisasi menguat pasca reformasi. Misalnya, dalam catatan Damanik, mobilisasi etnisitas digunakan untuk memekarkan Kabupaten Dairi yang kemudian menghasilkan Kabupaten Pakpak Barat pada tahun 2003. Damanik menyebutkan, etnis Pakpak mengalami peminggiran secara politik dalam beberapa hal. 1) atribut-atribut kultural yang ada di Kabupaten Dairi lebih banyak menonjolkan identitas atribut etnik lain ketimbang Pakpak; 2) eksklusivitas pada aspek etno-religio yakni dominasi institusi agama (Protestan) dari etnik imigran; 3) etnis Pakpak terpinggirkan dalam ruang politik yang ada di Kabupaten Dairi, misalnya untuk menjadi kepala daerah, pejabat daerah maupun menjadi Aparat Sipil Negara (ASN); 4) etnik Pakpak di Dairi mengalami keterbelakangan ekonomi sebagai akibat dari peminggiran politik yang berlangsung (Damanik, 2018). Melalui kondisi peminggiran politik ini, kemudian para elite politik dan masyarakat yang berasal dari Suku Pakpak menjadikan etnisitas sebagai konstruksi sosial guna menghasilkan daya ledak dalam membangun gerakan politik pemekaran daerah dan terbukti tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Pakpak Barat (Damanik, 2018).

Sedangkan dalam konteks pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara pada 2018, lapisan isu agama dan etnis bekerja dalam satu ritme dalam rangka memperebutkan suara pemilih. Pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) selain menggunakan isu agama, juga menggunakan isu etnisitas. Misalnya Edy Rahmayadi yang mengklaim diri sebagai etnik Melayu Langkat sementara Musa Rajekshah mengklaim sebagai Melayu Batubara. Demikian pula Musa Rajekshah mengaku bahwa dirinya termasuk bagian dari etnik Jawa melalui Istrinya. Sementara itu, Edy Rahmayadi mengklaim diri sebagai etnik Mandailing melalui istrinya. Demikian dengan pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) yang juga memainkan ritme etnis untuk memperebutkan pemilih yang berasal dari etnik Jawa dan Toba (Damanik, 2018).

Bagaimana posisi pemilih yang rasional dan psikologis? Kecenderungan memilih rasional berada pada urutan kedua di Kota Medan, di mana berdasarkan survei ARSC berada di angka 36,8 persen sedangkan perilaku memilih psikologi berada

pada urutan terakhir dan angkanya cukup kecil, yakni 10,80 persen.

Tindakan memilih rasional bertumpu pada kepentingan ekonomi di mana seorang melakukan sesuatu didasarkan pada asas-asas ekonomi. Oleh karena itu, dalam tindakan rasional yang dipertanyakan adalah soal untung rugi dari tindakan tersebut (Bartels, 2010). Dalam studi elektoral, tindakan rasional juga dihubungkan dengan aspek kinerja pemerintah (petahana) sebagai dasar evaluasi dalam memberi *reward* atau *punishment*.

Pemilih rasional di Kota Medan memang ditopang oleh semakin kritisnya masyarakat melakukan evaluasi program pemerintah. Pada gambar 15 pemilih secara kritis melakukan penilaian aspek mana dari kinerja pemerintah yang dianggap tidak berhasil. Misalnya soal penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, maupun penciptaan lingkungan pemerintahan daerah yang bertumpu pada transparansi dan akuntabilitas. Dari sini terlihat sebagian pemilih yang rasional, mendasarkan pilihannya pada visi-misi dan program kandidat dalam pembangunan daerah. Melalui ini pemilih hendak melihat apakah program yang ditawarkan bisa memberikan keuntungan terhadap dirinya. Pertanyaan yang muncul di benak pemilih; bagaimana mengatasi persoalan pandemi Corona, bagaimana membuka peluang kerja, bagaimana mengatasi persoalan korupsi dan lain-lain. Dari sini terlihat karakter pemilih rasional sadar atas pilihan politiknya terkait langsung dengan kepentingan masyarakat jangka panjang.



Sumber: Survei ARSC, 2020

Gambar 14. Program yang dianggap tidak berhasil

Sedangkan pemilih psikologis bisa dibilang jumlahnya cukup kecil di Kota Medan. Sebagaimana dijelaskan diawal, pemilih psikologis bertumpu pada tiga hal utama: (1) Persepsi terhadap kandidat, (2); persepsi terhadap tema tema yang diangkat dan (3); identifikasi kedekatan dengan partai politik (Roth, 2008). Pasa aspek kedekatan dengan kandidat, hanya

sebagian pemilih yang mengaku dekat dengan calon kandidat yang muncul, dan itu masih samar-samar. Kondisi ini kami menilai cukup wajar mengingat belum ada penetapan resmi pasangan calon yang akan berkompetisi. Sehingga informasi berkaitan dengan calon yang akan mengikuti pilwali masih sebatas dari media massa, spanduk, maupun informasi dari ruang publik, seperti warung kopi, maupun komunitas masyarakat.

Sedangkan konteks kedekatan dengan partai, sebagaimana diulas sebelumnya, hal ini tidak lepas dari menurunnya tingkai party-ID secara nasional. Artinya, ini terjadi tidak hanya di Kota Medan melainkan di berbagai daerah masyarakat merasa tidak dekat dengan partai karena citra partai sendiri, misalnya lemahnya pelembagaan partai, perilaku koruptif yang dilakukan oleh anggota partai, hingga buruknya kinerja kader partai yang ada di eksekutif maupun legislatif.

Kesimpulan dari sub bagian ini adalah bahwa komposisi perilaku pemilih di pemilihan Walikota Medan 2020 masih didominasi oleh perilaku memilih sosiologis dengan aspek preferensi agama, etnisitas, dan gender. Sedangkan perilaku memilih rasional juga muncul yang ditandai dengan preferensi pada visi-misi dan program kandidat. Corak pada pemilih rasional ini ditandai dengan cukup kritisnya mereka pada evaluasi program pemerintah, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, politik, maupun tatakelola pemerintahan daerah. Adapun perilaku memilih yang psikologis porsinya sangat kecil, yang ditandai dengan sedikitnya pemilih yang merasa menjadi bagian dari partai politik maupun kedekatan dengan kandidat.

Kompleksitas Perilaku Memilih

Memahami perilaku memilih memang sepenuhnya tidak dapat dijelaskan pada satu aspek, atau tidak sepenuhnya bisa disimpulkan dalam satu garis linier. Perilaku memilih memiliki kompleksitas tersendiri. Misalnya, ada sebagian pendapat yang berasumsi bahwa pemilih di daerah perkotaan—dengan sumberdaya memadai berupa akses informasi dan internet yang terbuka, tingkat pendidikan yang cukup merata dan atribut modernitas kota lainnya—cenderung kepada tipologi pemilih rasional, namun demikian fakta di lapangan tidak sesederhana itu.

Studi Burhanuddin Muhtadi dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan survei tingkat kepuasan atas kinerja petahana (Ahok) sangat besar, namun pemilih enggan untuk memilih kembali sebagai gubernur lantaran faktor agama dan etnis. Gap antara yang puas dan kedipilihan dalam survei ini muncul jauh sebelum insiden Almaidah dan aksi 212. Para pemilih mengakui bahwa Ahok bekerja dengan baik dalam tatakelola pemerintahan,

tapi mereka enggan memilih lantaran identitas Ahok yang berlapis, Kristen dan juga Tionghoa. Jika mengikuti asumsi yang berkembang pada pemilih perkotaan yang cenderung rasional, dengan survei tingkat kepuasan atas kinerja Ahok yang mencapai 73,4 persen, maka elektabilitas Ahok juga akan mencapai 70 persen lebih. Tapi faktanya pada hasil pemilihan, Ahok-Djarot hanya memperoleh 42,99 persen di putaran pertama, dan putaran kedua 42,04 persen. Berdasarkan ini kemudian Muhtadi menyebut pemilih rasional dalam kasus Pilgub Jakarta 2017 hanyalah mitos (Muhtadi B. , 2013). Sebagai mitos, ia hanya bekerja pada level keyakinan, tapi faktanya tidak demikian.

Apa yang terjadi pada perilaku memilih Kota Medan juga menggambarkan kompleksitas. Misalnya mayoritas pemilih menganggap ia tidak bisa dipengaruhi oleh tokoh tertentu dalam menentukan pilihannya, itu sebabnya ketika disodorkan siapa yang menentukan terhadap pilihannya ialah diri sendiri. Tampak di sini pemilih sangat otonom dan tidak terikat dengan jaring klientelisme politik. Namun demikian, ketika ditanya apakah dukungan tokoh agama terhadap kandidat berpengaruh terhadap pilihan politiknya, mayoritas pemilih menjawab berpengaruh. Dari sini terlihat bahwa pemilih hendak menunjukkan sikap otonomnya sebagai warga, namun di sisi lain ketika berkaitan dengan atribut agama ia hendak menunjukkan sikap loyal terhadap agama sehingga dukungan ulama dianggap berpengaruh.

Kompleksitas lain juga muncul pada program atau isu yang diharapkan oleh pemilih terhadap kandidat. Terdapat tiga program yang cukup tinggi nilainya yang diharapkan oleh pemilih, yakni penciptaan lapangan kerja, pemerintahan bersih dari korupsi, dan pengendalian harga bahan pokok. Namun ketika bergeser pada aspek kriteria utama calon wali kota, salah satu yang cukup tinggi diajukan oleh pemilih justru faktor agama. Artinya, jika memang lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, semestinya preferensi yang dominan diajukan pemilih pada isu atau program yang ditawarkan kandidat, bukan faktor agama. Oleh karena itu, hal ini kemudian memberikan penjelasan bahwa memahami perilaku pemilih akan menemukan kompleksitas tersendiri.

Temuan unik lainnya pada survey kami adalah inkonsistensi pada pemilih terkait dengan politik dinasti. Berdasarkan pertanyaan terkait alasan memilih figur Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan. Ketika diajukan pertanyaan terkait dengan alasan memilih Bobby, sebanyak 35% responden menjawab memilih karena Bobby adalah menantu Presiden RI Joko Widodo (35,2%) kemudian disusul jawaban karena didukung partai besar pendukung pemerintah (19,9%), berasal dari

latar belakang pengusaha/keluarga kaya (18,5%) dan yakin pasti menang (17,6%), dan tidak menjawab (8,8%). Sementara di sisi lain terdapat juga pemilih yang tidak memilih Bobby karena dia belum berpengalaman di Pemerintahan (41,1%), menantu Presiden Joko Widodo (24,2%), kurang merakyat (14,4%), tidak ada prestasi yang menonjol (8,2%), didukung partai pendukung pemerintahan (0,5%) dan tidak menjawab (11,5%).

Sehingga argumen rasional yang didukung oleh data statistik pemilih sosiologis untuk menjelaskan kemenangan Bobby Nasution pada pemilihan Walikota Medan 2020 adalah bahwa figur ini memiliki basis pendukung sosiologis yang kuat dari pemilih suku Batak dan Jawa. Pendukung pasangan nomor urut 2 mendapat dukungan dari pemilih suku Jawa dari sosok Kahiyang Ayu yang notabene merupakan anak kandung Presiden RI Joko Widodo dengan latar belakang suku Jawa. Pasangan nomor urut 2 juga mendapatkan *booster* suara pemilih suku Melayu dari sosok calon Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman, yang memiliki latar belakang suku Melayu.

Sebaliknya pasangan nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi merupakan kombinasi dari figur dengan berlatar belakang suku Batak dan Minang. Ini tentunya lemah dalam hal dukungan pemilih sosiologis. Ditambah lagi alasan bahwa dari segi dukungan partai politik juga lemah karena didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, kemenangan Bobby Nasution dalam Pilwali Kota Medan 2020 tak lepas dari kesuksesannya mencegah koalisi Gerindra-PKS sebagaimana pada Pilkada Sumatera Utara 2018. Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman memilih untuk membangun koalisi gemuk yang terdiri dari 8 partai politik yaitu PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, PSI, Hanura, dan PPP. Kunci kemenangannya terletak pada pelibatan partai Gerindra dalam gerbong koalisi. Hal ini mengingat partai Gerindra memiliki basis massa pemilih dengan preferensi agamis. Tentunya hal ini didasarkan pada pengalaman Pilkada Sumatera Utara 2018 dan Pilkada Jakarta 2017. Sehingga memecah bangunan koalisi antara Gerindra dan PKS menjadi strategi ideal bagi kemenangan Bobby Nasution.

SIMPULAN

Studi ini mencatat tiga hal pokok dalam perilaku memilih masyarakat Kota Medan pada pemilihan Walikota Medan 2020. Pertama, pemilih sosiologis tetap mendominasi dalam gelaran pemilihan yang didorong oleh faktor agama, etnisitas, dan gender. Sebanyak 43,1% pemilih sosiologis tercatat dalam survey, yang disebabkan oleh rekam jejak

pertarungan politik pada Pilgub Sumatera Utara 2018 dan Pemilu 2019 yang mengkonfrontasikan isu agama dan etnisitas secara *vis-à-vis*. Kuatnya karakteristik pemilih sosiologis ini mampu ditangkap oleh pasangan pemenang sebagai basis penentuan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Medan 2020. Kedua, pemilih rasional dan psikologis menempati posisi kedua dan ketiga dalam hal orientasi politik masyarakat, yang terekam berada pada angka 36,1% dan 10,8%. Ini cukup mengejutkan bagi masyarakat di wilayah urban seperti Medan. Isu atau program yang mengemuka dari pemilih rasional adalah soal pembukaan lapangan kerja, integritas pemimpin dan penciptaan *good governance*, dan pengendalian harga bahan pokok. Kedekatan pemilih terhadap partai (*Party ID*) tidak cukup signifikan menjadi alasan masyarakat untuk datang ke TPS dan menjatuhkan pilihan politiknya pada kandidat yang diusung oleh partai pilihan mereka pada Pemilu 2019.

Ketiga, tingginya pemilih yang menentukan pilihan berdasar pada agama menjadi alasan bagi para kandidat untuk tidak membawa kembali isu ini ke panggung pertarungan. Baik kandidat petahana maupun penantang tidak mengeksploitasi fakta ini sebagai pilihan strategi dalam Pilwali Kota Medan 2020. Kemenangan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman pada kontestasi terutama disebabkan oleh strategi merangkul keragaman dengan membentuk koalisi gemuk. Pasangan ini secara tepat mengikutsertakan partai Gerindra dalam bangunan koalisi dan memecah persekutuan mereka dengan PKS sebagaimana dalam Pilgub Sumatera Utara 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Akar Rumput Strategic Consulting. (2020). *Survey Perilaku Memilih Masyarakat Kota Medan: Periode Survey Juli 2020*. ARSC.
- Ananta, A., Arifin, E., Hasbullah, M., Handayani, N., & Pramono, A. (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bartels, L. M. (2010). The study of electoral behavior. In J. E. Leighley, *The Oxford handbook of American elections and political behavior* (pp. 239-261). Oxford: Oxford University Press.
- BPS Kota Medan. (2020). *Kota Medan Dalam Angka 2020*. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Bruner, E. M. (1963). *Medan: the role of kinship in an Indonesian city*. Honolulu: Spoehr.
- Bruner, E. M. (1974). *The expression of ethnicity in Indonesia*. Tavistock Publication.
- CNN Indonesia. (2020, August 13). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota-medan-berturut-turut-terjerat-korupsi>
- Damanik, E. L. (2018). *Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara*. Medan: Simetri Insitute.
- Fischer, C. S. (1975). Toward a subcultural theory of urbanism. *American journal of Sociology*, 80(6), 1319-1341.
- Ginting, R. (2020, July 31). Perilaku Memilih Masyarakat Kota Medan. (A. H. Ubaid, Interviewer)
- Goldman, S. (1966). Voting behavior on the United States courts of appeals, 1961-1964. *The American Political Science Review*, 60(2), 374-383. .
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. . *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308.
- Hasselgren, J. (2000). *Rural Batak, kings in Medan: The development of Toba Batak ethno-religious identity in Medan, Indonesia, 1912-1965*. Stockholm: Swedish Institute of Missionary Research.
- Johnson, J. C. (1990). *Selecting Ethnographic Informants*. Sage Publication Inc.
- Liddle, R. W. (1970). *Ethnicity, party, and national integration: An Indonesian case study*. Yale University Press.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik* 10 (1), 17.
- Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. *MAARIF Journal*, 13(2), 68-86.
- Mujani, S. (2020). Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial Election. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 419-450.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nugroho, D. O. (2020, July 11). Perilaku Memilih Masyarakat Kota Medan. (A. H. Ubaid, Interviewer)

- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. . *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6 (01), 25-34.
- Poltracking Indonesia. (2020). *Laporan Persepsi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Walikota Medan 2020*. Jakarta Indonesia: Poltracking Indonesia.
- Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249-265.
- Roth, D. (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Für Die Freiheit.
- Sianipar, G.J. (2011). *Christian-Muslim Relationships in Medan and Dalihan na tolu: A Social Capital Study of The Batak Cultural Values and Their Effect on Interreligious Encounters*. Newcastle: University of Newcastle.
- Suryadinata, L., Arifin, E., & Ananta, A. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sutardi. (2020, August 9). Perilaku Memilih Masyarakat Medan. (A.H. Ubaid, Interviewer)
- Trihartono, A., & Patriadi, H. B. (2016). The 2014 Indonesian general election and beyond: Melting "frozen" cleavages. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1(1), 25-43.
- Van Klinken, G. (2007). *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. London: Routledge.